

ABSTRAK

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Lhokseumawe Merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak anak. Mulai dari hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Melalui pengintegrasian komitmen antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang tergabung dalam gugus tugas KLA. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses Collaborative Governance Dalam Implementasi Standar Kota Layak Anak Di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan informan dari pemerintah yaitu Bappeda Kota Lhokseumawe, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Lhokseumawe. Informan dari masyarakat Kota Lhokseumawe, Forum Anak Daerah Kota Lhokseumawe, dan Akademisi Universitas Malikussaleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance masih belum berhasil secara maksimal karena belum adanya pelibatan aktif seluruh aktor dalam gugus tugas KLA. Berdasarkan indikator pertama identifikasi hambatan dan peluang, menunjukkan belum terciptanya koordinasi yang baik antar gugus tugas, masih belum adanya fokus pemecahan masalah dari setiap daerah serta aktor yang paling berpengaruh dan aktif ialah DPPPA tingkat kab/kota maupun provinsi. Berdasarkan indikator kedua debat strategi, terdapat tiga cara efektif mewujudkan KLA yaitu perlu adanya pelibatan suara anak, adanya regulasi tiap klaster dan adanya pelibatan aktor non pemerintah khususnya lembaga masyarakat. Berdasarkan indikator ketiga tindakan kolaborasi, terdapat beberapa payung hukum yang dapat menunjang jalannya proses perwujudan KLA namun tetap dibutuhkan aksi nyata dari setiap komitmen yang ada.

Kata Kunci : Collaborative Governance, Kota Layak Anak

ABSTRACT

The development of a Child Friendly District (KLA) in Lhokseumawe City is an effort to solve problems related to children's rights. Starting from the right to life, right to protection, right to growth and development and right to participation. Through integrating commitments between government, community and business that are members of the KLA task force. This study aims to determine the Collaborative Governance process in the Implementation of Child Friendly City Standards in Lhokseumawe City. The research method used is descriptive qualitative with informants from the government, namely Bappeda Lhokseumawe City, the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) Lhokseumawe City. Informants from the community of Lhokseumawe City, Lhokseumawe City Regional Children's Forum, and Malikussaleh University Academics. The results showed that collaborative governance was still not maximally successful because there was no active involvement of all actors in the KLA task force. Based on the first indicator of identifying obstacles and opportunities, it shows that there is no good coordination between task forces, there is still no focus on solving problems from each region and the most influential and active actor is the DPPPA at the district / city and provincial levels. Based on the second indicator of strategic debate, there are three effective ways to realize KLA, namely the need to involve children's voices, the existence of regulations for each cluster and the involvement of non-government actors, especially community institutions. Based on the third indicator of collaborative action, there are several legal payings that can support the process of realizing KLA but still need real action from each existing commitment.

Keywords : Collaborative Governance, Child Friendly City